

NASKAH PUBLIKASI

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN
MANDAT CORAL TRIANGLE INITIATIVES ON CORAL REEFS,
FISHERIES AND FOOD SECURITY CTI-CFF TAHUN 2010-2017**
*(The Effort of Indonesian Government in Implementing Coral Triangle Initiatives
on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Mandate 2010-2017)*

Oleh :

Darel Achmad Eka Putra
20140510324

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2018
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Simulasi Sidang HI

Dosen Pembimbing



Ratih Herningtyas, S.IP., M.A

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Dr. Titus Purwaningsih, S.IP., M.Si

Ketua Prodi Hubungan Internasional


Dr. Nur Azizah, M.Si

KERJASAMA INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN MANDAT *CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES, AND FOOD SECURITY* (CTI-CFF) TAHUN 2010-2017

Darel Achmad Eka Putra

20140510324

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Email: darel.achmad.2014@fisipol.umy.ac.id / dareleka88@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to describe the importance of environmental diplomacy in saving threatened marine ecosystems. The sea has unique physical characteristics to become a challenge of cooperation between countries in establishing a cooperation. This paper finds that the cooperation of the Indonesian government in implementing the CTI-CFF mandate is through cooperation, both cooperation between signatories and partner countries as well as cooperation with Non-Governmental Organization (NGO). This is done by Indonesia in order to contribute Indonesia in saving the threatened marine ecosystem.

Keywords: *Cooperation, Environmental Diplomacy, Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa pentingnya diplomasi lingkungan dalam menyelamatkan ekosistem laut yang terancam. Laut memiliki ciri fisik yang unik menjadi sebuah tantangan kerjasama antar negara dalam menjalin sebuah kerjasama. Tulisan ini menemukan bahwa kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan mandat CTI-CFF adalah dengan kerjasama, baik kerjasama antar negara anggota (*signatories*) dan negara mitra maupun kerjasama dengan *Non-Governmental Organization* (NGO). Hal tersebut dilakukan Indonesia dalam rangka ikut andil Indonesia dalam menyelamatkan ekosistem laut yang terancam.

Kata kunci: *Kerjasama, Diplomasi Lingkungan, Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*

PENDAHULUAN

Isu perairan, baik dari isu perbatasan perairan, keamanan perairan, maupun isu lingkungan perairan menjadi sebuah isu kontemporer dalam hubungan internasional yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini lantaran ciri fisik yang dimiliki oleh sebuah perairan yang tidak dapat dipatok maupun diberi garis pembatas layaknya batas pada daerah daratan. Dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan ditimbulkan pada perairan adalah kepunahan spesies yang ada didalamnya, hilangnya mata pencaharian, pendidikan hingga penderitaan bagi masyarakat pesisir dan ketidak seimbangan ekonomi yang terjadi di dunia. Indonesia merupakan negara maritim dengan kawasan laut mencapai duapertiga dari luas daratannya. Luas terumbu karang yang terdapat di Indonesia mencapai 50.875 km² yang menyumbang 18% luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di kawasan Segitiga Terumbu Karang. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terletak pada kawasan Segitiga Terumbu Karang atau juga sering disebut dengan *Coral Triangle*. Kawasan ini juga sering disebut dengan “Amazon Laut” dengan cangkupan 30% luas terumbu karang dunia dengan memiliki luas 73.000 km² serta 75% dari seluruh spesies karang yang dikenal, serta menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 3000 jenis ikan¹

Kekayaan laut dunia yang sangat dipertimbangkan mulai dari nilai ekonomi, pariwisata, hingga perikanan. Laut Indonesia juga memiliki nilai yang diperhitungkan di kawasan segitiga terumbu karang dunia, terutama kekayaan ekosistem terumbu karang dan spesies ikan tangkap. Namun, dengan melihat kekayaan yang dimiliki laut, banyak manusia yang mengambil kekayaan laut tersebut berupa terumbu karang, perburuan ikan menggunakan bahan-bahan maupun cara-cara yang tidak dibenarkan tanpa melihat dampak yang diperbuat. Tidak hanya manusia saja, faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebabnya. Sebagai contohnya *global warming* memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan ekosistem laut tersebut. Melihat bahwa sifat laut yang terkoneksi, tidak ada batasan dan tidak dapat diberi patokan, maka setiap negara yang memiliki wilayah di kawasan tersebut wajib untuk menjaga dan melindungi kawasan tersebut. Tidak seperti karakteristik perbatasan wilayah daratan yang memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga laut memiliki penyelesaian yang khusus. Jika ada sebuah masalah di wilayah perairan atau laut, maka penyelesaian yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara bilateral, namun diselesaikan dengan kerjasama multilateral karena laut bukan hanya milik dari satu golongan maupun satu negara saja. Melihat hal tersebut, wajar kiranya

bahwa banyak pihak termasuk pemerintahan Indonesia ikut andil dalam melestarikan kawasan terumbu karang serta membentuk sebuah kerjasama multilateral dengan negara di kawasan tersebut.

Sehingga salah satu upaya yang dilakukan, adalah melalui *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF), yaitu Indonesia sebagai penggagas, dengan kelia anggota lainnya yakni Timor Leste, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Setiap negara anggota memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur rancangan nasional tiap negara dengan melihat rincian Regional Plan on Action (RPOA) yang dimiliki oleh CTI CFF dan merupakan mandat langsung dari CTI CFF. Tulisan ini akan memaparkan bagaimana pemerintah Indonesia dalam melaksanakan mandat CTI-CFF.

PEMBAHASAN

KERANGKA BERPIKIR: MULTI-TRACK DIPLOMACY

Dalam pengertian umum, diplomasi merupakan segala hal yang dilakukan dalam mengelola hubungan antara negara-bangsa. Sedangkan inti tindakan diplomasi secara substansial adalah negosiasi, yaitu mengenai bagaimana setiap pihak berupaya untuk menyelesaikan segala macam sengketa yang mengemuka diantara dua negara atau lebih². Diplomasi adalah seperangkat sistem komunikasi antar negara dalam sistem internasional yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan melalui negosiasi³. Diplomasi sering dianggap sebagai aktivitas perdamaian, meski bisa terjadi dalam perang atau konflik bersenjata atau digunakan dalam menangani tindakan kekerasan tertentu. Banyak cara mendapatkan sebuah tujuan dalam diplomasi, salah satunya dengan diplomasi multi jalur. Menurut John W. McDonald (2003), diplomasi multi-jalur atau *multi-track diplomacy* adalah suatu cara konseptual yang memandang pembentukan perdamaian dunia sebagai suatu sistem kehidupan.

Kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan antara individu, lembaga, dan komunitas dianggap dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia⁴. Menurut Diamond dan McDonald dalam tulisan Sheila Medina berjudul “Strategi Muhammadiyah dalam Proses Perdamaian Konflik Mindanao” bahwa *multi-track diplomacy* merupakan sebuah kerangka kerja konseptual sebagai suatu sistem kehidupan dan refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan dimana hal tersebut berkontribusi dalam proses perwujudan perdamaian di lingkup internasional. Dr. Diamond dan Duta Besar McDonald membagi kesembilan jalur tersebut

menjadi *government, professional conflict resolution, business, private citizens, research, training and education, activism, religious, funding, dan public opinion/communication*. Masing-masing dari sembilan jalur tidak beroperasi secara sendirinya melainkan sistem yang saling berhubungan dimana masing-masing jalur berada pada jalur, mempengaruhi dan mendukung upaya diplomasi yang tercipta.

Jalur pertama ialah pemerintah (*Government*). Pembuatan kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek-aspek proses formal pemerintahan. *Jalur kedua Professional Conflict Resolution* (aktor profesional atau non-pemerintah). Diplomasi jalur kedua diaplikasikan aktor profesional non-pemerintah melalui pembentukan perdamaian melalui resolusi konflik dengan mencoba menganalisis, mencegah, mengatasi, dan mengelola konflik internasional melalui aktor-aktor non-negara. *Jalur ketiga* yaitu diplomasi melalui jalur bisnis. Diplomasi jalur ketiga bertujuan membangun perdamaian melalui pengadaan peluang ekonomi, persahabatan internasional melalui komunikasi informal, dan memperoleh dukungan untuk kegiatan perdamaian lainnya. Jalur keempat yakni diplomasi melalui warga negara privat (*private citizen*). *Trek* keempat ini ingin membentuk perdamaian melalui keterlibatan individu. Berbagai cara yang dapat warga negara lakukan dalam kegiatan perdamaian dan pembangunan yaitu diplomasi warga negara (*citizen diplomacy*), program pertukaran, organisasi sukarela swasta (*private voluntary organizations*), lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan khusus.

Kemudian yang menjadi *jalur* kelima yaitu penelitian, pelatihan, dan pendidikan. Program penelitian terhubung kepada program-program dalam perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian khusus. Sementara program pelatihan bertujuan untuk memberi pelatihan dalam keterampilan praktisi seperti negosiasi, mediasi, penyelesaian konflik, dan memfasilitasi sebagai pihak ketiga. Dari segi pendidikan, diplomasi *trek* kelima ini mencakup berbagai aspek studi global seperti studi perdamaian dan ketertiban dunia, analisis konflik, manajemen, dan resolusi. Diplomasi *track* kelima ingin membentuk perdamaian dunia melalui unsur pembelajaran. *Jalur* keenam yang disebutkan dalam tulisan John W. McDonald (2003) yakni diplomasi dari para aktivis. *Trek* keenam ini mencakup para aktivis dalam isu perdamaian dan lingkungan seperti isu pelucutan senjata, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi kelompok kepentingan khusus mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Para aktivis tersebut tentu saja memiliki kelebihan dalam mempengaruhi proses pembuatan

kebijakan oleh pemerintah dengan aksinya melalui bentuk protes, advokasi, dukungan, pengawasan, dan lain-lain.

Jalur ketujuh yakni *Religious* (unsur agama) yang dilibatkan dalam proses perwujudan perdamaian melalui kekuatan kepercayaan. Diplomasi trek ketujuh dapat menunjukkan bagaimana suatu kepercayaan dan kegiatan yang berorientasi perdamaian dilakukan oleh komunitas-komunitas spiritual dan religius. Komunitas-komunitas tersebut melakukan beberapa gerakan berbasis moral seperti *pacifism*, *sanctuary*, dan *non-violence*. Selanjutnya yaitu diplomasi melalui jalur pendanaan yang ingin membangun perdamaian melalui penyediaan *resources* atau sumber daya. Diplomasi jalur kedelapan ini mengacu pada komunitas-komunitas pendanaan seperti yayasan dan filantropis individual yang mampu memberikan dukungan keuangan untuk banyak kegiatan yang dilakukan oleh jalur-jalur lain. Lalu jalur terakhir yaitu pentingnya unsur media dan komunikasi dalam berdiplomasi. Diplomasi jalur kesembilan berusaha mewujudkan perdamaian melalui unsur informasi dan juga menunjukkan bagaimana opini publik akan dibentuk dan diungkapkan melalui sosial media, baik media cetak maupun media elektronik.

PEMBENTUKAN CTI-CFF HINGGA MANDAT

Perjalanan CTI-CFF diawali pada bulan Maret 2006 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan sebuah pesan resmi pada pertemuan kedelapan para pihak pemerintah CT6 beserta Australia dan Amerika dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP-8 CBD di Brazil) yang menekankan pentingnya kawasan segitiga terumbu karang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengemukakan keinginannya untuk: (i) mempercepat pengembangan jejaring kawasan konservasi laut di kawasan coral triangle, dan (ii) memformalisasi kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan coral triangle. Menindaklanjuti pesan yang disampaikan Presiden saat COP-8 CBD, maka pada bulan Agustus 2007, Presiden Yudhoyono menulis surat kepada tujuh kepala negara (Philippines, Malaysia, Timor Timur, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan juga Australia dan Amerika Serikat) mengusulkan inisiatif *Coral Triangle* untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan. Inisiatif tersebut ditargetkan untuk memperoleh komitmen politis tingkat tinggi bersama oleh ke-enam negara di kawasan ini, didukung oleh komitmen pendanaan internasional yang signifikan.

Sebagai langkah selanjutnya, Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, mengirimkan surat kepada menteri terkait di Negara CT6 lainnya serta Amerika Serikat dan Australia. Surat tersebut merupakan undangan kepada Negara-negara dimaksud untuk menghadiri the *1st Senior Officials Meeting (SOM) of CTI* di Bali bulan Desember 2007. *Senior Official Meeting* merupakan pertemuan yang dilakukan oleh para pejabat senior dari masing-masing negara anggota CTI-CFF. Berbagai pertemuan dilakukan untuk menindaklanjuti rangkaian pembentukan CTI CFF, hingga pada tahun 2009 CT CFF resmi dibentuk. CTI CFF memberikan mandat kepada setiap negara anggota saat pembentukan awal mula CTI pada tahun 2009, dengan memberikan perintah untuk setiap anggota untuk mempromosikan kerjasama regional, berbagi pelajaran, dan memfasilitasi pembelajaran di enam negara Coral Triangle.

“...The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Regional Secretariat was created during the First CTI-CFF Senior Officials Meeting in Bali in December 2007. It is mandated to promote regional cooperation, sharing of lessons, and facilitate learning across the six Coral Triangle countries - Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea Philippines, Solomon Islands and Timor-Leste. The Regional Secretariat also coordinate and monitors the progress in achieving the CTI-CFF Regional Plan of Action goals.”⁵

Kegiatan utamanya mencakup bidang-bidang berikut: pengembangan organisasi, penjangkauan dan komunikasi, koordinasi dan mekanisme regional, kelompok kerja teknis dan tematik, pengembangan laporan regional utama, dan pengembangan kapasitas. Ini juga berfungsi sebagai penghubung utama dan untuk semua fungsi resmi CTI-CFF seperti Rapat Pejabat Senior CTI-CFF tahunan dan Rapat Menteri CTI-CFF tahunan. Berlokasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Indonesia. Mandat CTI CFF merupakan sebuah mandat yang ditujukan untuk keenam negara CT6 yang diadopsi dalam *Regional Plan on Action*. Dari RPOA diturunkan kepada setiap negara menjadi *National Plan on Action*. Dari keenam negara anggota, memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melaksanakan mandat yang ada. Memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hidup ekosistem laut yang ada di kawasan segitiga terumbu karang.

Target utama dari CTI-CFF adalah menjadi forum yang efektif dalam memperkuat upaya membenahan pengelolaan sumber daya laut, yang tertuang pada *Regional Plan of Action*

(RPoA) dan telah diadopsi secara nasional ke dalam *National Plan of Action* (NPoA) dengan tujuan:

1. Bentang laut dibentuk dan dikelola secara efektif;
2. Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan dan sumber daya laut lainnya diaplikasikan secara penuh;
3. Kawasan konservasi laut dibentuk dan dikelola secara efektif;
4. Tindakan adaptasi perubahan iklim tercapai; dan
5. Status spesies terancam punah menurun.

KERJASAMA YANG DILAKUKAN INDONESIA

Indonesia sebagai negara yang peduli dengan isu lingkungan, dan memiliki kekayaan laut yang begitu melimpah melihat kerusakan laut yang telah banyak terjadi di beberapa sektor dan wilayah yang ada. Dengan melihat hal tersebut, tentunya sebagai salah satu negara dengan luas wilayah perairan dan kekayaan laut yang melimpah di kawasan segitiga terumbu karang dunia, pantas sewajarnya Indonesia mengajak serta negara kawasan terumbu karang dan mitra serta khalayak luas untuk bersama-sama melindungi ekosistem laut dari berbagai macam ancaman yang terjadi. Dalam hal ini, kerjasama antar enam negara anggota CTI CFF dan negara mitra lainnya terus dikembangkan dengan melihat target *Regional Plan of Action* (RPOA) yang diterapkan oleh CTI CFF dimana telah diturunkan pada *National Plan on Action* (NPOA) tiap negara. Peran Indonesia tentunya menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan negara penggagas dan negara dengan kekayaan laut yang paling besar di antara negara-negara lainnya.

Sebagai contoh pelaksanaan program CTI-CFF di Indonesia sesuai dengan NPOA yang tujuan dan sasaran telah dikembangkan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP) yang terkait dengan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan. Untuk melanjutkan program-program tersebut, NPOA perlu ditinjau dan dikembangkan secara menyeluruh untuk menghasilkan *outcome* yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi telah dihasilkan. NPOA meliputi tata letak, struktur dan target yang ditetapkan dalam RPOA. Seperti halnya RPOA, NPOA terdiri dari dua bagian, pertama mencakup komitmen menyeluruh khususnya untuk posisi dan kondisi Indonesia, dan kedua menjabarkan komitmen khususnya terkait dengan kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mencapai target yang disepakati dalam RPOA tersebut.

Salah satunya, Indonesia bisa menerapkan pendekatan ekosistem dan pengelolaan bersama untuk perikanan yang berkelanjutan dan penguatan jejaring *Coral Triangle Marine Protected*

Areas (CTMPAs) untuk melindungi ikan tuna, ikan karang dan ikan ekonomis penting lainnya pada masa/proses pemijahan di kawasan daerah perlindungan laut (*marine protected area/MPA*) serta dapat mengembangkan kapasitas konservasi sumber daya laut, perlindungan dan pelestarian sumber-sumber perikanan yang bermigrasi secara lintas batas negara. kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia terdiri dari kerjasama dengan pemerintahan baik dengan negara anggota CTI CFF maupun negara mitra serta kerjasama dengan aktor lainnya seperti *Non-Governmental Organization*. Kerjasama yang dilakukan dimulai dari peyuluhan, pelatihan, hingga keterlibatan masyarakat mengenai kawasan konservasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk melaksanakan mandate yang diamanahkan oleh CTI-CFF. Kerjasama ini tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan di setiap sisinya. Akan tetapi, kerjasama ini membuktikan bahwa keseriusan masyarakat dari mulai pemerintah hingga grass root peduli akan masalah lingkungan yang ada, terutama masalah perairan. Untuk itu, harapan kedepan dengan adanya kerjasama yang ada, kawasan segitiga terumbu karang dunia ini tetap lestari untuk keberlangsungan kehidupan makhluk laut baik berupa ikan, terumbu karang maupun makhluk biotik lainnya yang nantinya akan berdampak bagi kesejahteraan dan keseimbangan dunia.

KESIMPULAN

Kekayaan laut dunia sangat dipertimbangkan mulai dari nilai ekonomi, pariwisata, hingga perikanan. Laut Indonesia juga memiliki nilai yang diperhitungkan di kawasan segitiga terumbu karang dunia, terutama kekayaan ekosistem terumbu karang dan spesies ikan tangkap. Namun, dengan melihat kekayaan yang dimiliki laut, banyak manusia yang mengambil kekayaan laut tersebut berupa terumbu karang, perburuan ikan menggunakan bahan-bahan maupun cara-cara yang tidak dibenarkan tanpa melihat dampak yang diperbuat. Tidak hanya manusia saja, faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebabnya. Sebagai contohnya *global warming* memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan ekosistem laut tersebut.

Melihat bahwa sifat laut yang terkoneksi, tidak ada batasan dan tidak dapat diberi patokan, maka setiap negara yang memiliki wilayah di kawasan tersebut wajib untuk menjaga dan melindungi kawasan tersebut. Tidak seperti karakteristik perbatasan wilayah daratan yang memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga laut memiliki penyelesaian yang khusus. Jika ada sebuah masalah di wilayah perairan atau laut, maka penyelesaian yang dilakukan tidak bisa

dilakukan secara bilateral, namun diselesaikan dengan kerjasama multilateral karena laut bukan hanya milik dari satu golongan maupun satu negara saja. Melihat hal tersebut, wajar kiranya bahwa banyak pihak termasuk pemerintah Indonesia ikut andil dalam melestarikan kawasan terumbu karang serta membentuk sebuah kerjasama multilateral dengan negara di kawasan tersebut.

Sehingga salah satu upaya yang dilakukan, adalah melalui *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF), yaitu Indonesia sebagai penggagas, dengan kelima anggota lainnya antara lain Timor Leste, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Setiap negara anggota memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur rancangan nasional tiap negara (NPOA) dengan melihat rincian Regional Plan on Action (RPOA) yang dimiliki oleh CTI CFF dan merupakan mandat langsung dari CTI CFF. Pelaksanaan program CTI-CFF di Indonesia sesuai dengan NPOA yang tujuan dan sasaran telah dikembangkan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP) yang terkait dengan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan. Untuk melanjutkan program-program tersebut, NPOA perlu ditinjau dan dikembangkan secara menyeluruh untuk menghasilkan *outcome* yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi telah dihasilkan. NPOA meliputi tata letak, struktur dan target yang ditetapkan dalam RPOA. Seperti halnya RPOA, NPOA terdiri dari dua bagian, pertama mencakup komitmen menyeluruh khususnya untuk posisi dan kondisi Indonesia, dan kedua menjabarkan komitmen khususnya terkait dengan kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mencapai target yang disepakati dalam RPOA tersebut. Dari hal tersebut, beberapa upaya pemerintah Indonesia yang terwakili oleh NCC Indonesia melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa pihak mulai dari negara anggota, negara mitra serta beberapa NGO yang bergerak di bidang yang sama untuk menyelamatkan ekosistem laut.

¹ Laurretta Burke, *Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang*, World Resource Institute, 2012.

² Tulus Warsito, Surwandono, *Diplomasi Bersih*, Repository UMY (repository.umy.ac.id), 2015, h. 1.

³ R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, New York, Routledge, 2013, h. 1.

⁴ Danaparamitha, Helmi Akbar, *Diplomasi Multi-trek*, 2014, diakses dari <http://unair.web.id> pada 26 oktober 2017.

⁵ *Coral Triangle Initiative on Coral reefs Fisheries and food security*, 2009 dari <http://www.coraltriangleinitiative.org> diakses pada tanggal 16 Oktober 2017

Referensi

Buku

- Griffiths, Martin. dkk. 2009. *Fifty Key Thinkers in International Relations*. New York: Routledge
- Karim, M. Faisal. dan Tirta N. Mursitama, 2015, *Mahir Menulis Akademik*, Depok: Linea Pustaka.
- Mackelworth, P. (2016). *Marine Transboundary Conservation and Protected Areas*. New York : Routledge.
- Masoed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- R.P.Barston. (2013). *Modern Diplomacy* . New York : Routledge .
- Satria, A. (2014). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wuryandari, Ganewati, dkk. 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: P2P-LIPI.

Jurnal/ Dokumen

- Adam, Lukman dan T. Ade Surya, 2013, *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2, Desember 2013.
- Apriwan. (2004, April). *Tinjauan Intermestik dalam Mekanisme Kebijakan Perubahan Iklim Global (REDD-UNFCCC): Prespektif Indonesia*. Jurnal Hubungan Internasional, III, 27.
- Burke, L. (2012). Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang . *World Resource Institute*.
- Giyanto, M. A. (2017). Status Terumbu Karang Indonesia 2017. *Pusat Penelitian Oseanografi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 1.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2013. *Mensinergikan Keamanan dan Kesejahteraan*. Jakarta: Tabloid Diplomasi, No. 61 Tahun VI. (15 Februari-14 Maret 2013).

Magdalena.M, T. (2016). Kepentingan Indonesia Aktif dalam CTI (Coral Triangle Initiative). *JOM FISIP Vol 3 No 2 - Oktober 2016*, 6.

Sudiar, S. (2004). *Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian*. Jurnal Hubungan Internasional , 35.

Tulus Warsito, S. (2015). *Diplomasi Bersih* . Repository UMY , hal 1.

Skripsi

Bestari, M. (2016). *French Multi-Track Cultural Diplomacy to Indonesia Through Private Sectors*. Master Thesis UMY, 28.

Efendi, A. W. (2017). *Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) IV dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia*. Under Graduate Thesis, 5.

Medina, S. (2017). *Strategi Muhammadiyah dalam Proses Perdamaian Konflik Mindanao*. Undergraduate thesis UMY, 16.

Ni Luh Ketut Ayu Irayani, I. F. (t.thn.). *Faktor – Faktor Pendorong Peran Aktif Indonesia dalam Kerjasama Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (Cti-Cff) Tahun 2006-2014*. 2.

Wulandari, P. H. (2016). *Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan di Kawasan Segitika Terumbu Karang Melalui Coral Triangle Initiative*. (hal. 88). Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wawancara

Tomy Ganda Pratama, S. S.-C. (2018, Maret 6). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melaksanakan mandat CTI-CFF tahun 2010-2017. (Darel Achmad Eka Putra, Pewawancara)

Website

Reza Akbar. 2014. *Green Theory: Upaya Penyelamatan Lingkungan Global* diakses dari <http://reza-akbar-fisip13.web.unair.ac.id> pada tanggal 8 April 2017.

CEED. (2015, September 15). *Phys.org*. Diambil kembali dari Phys.org: <https://phys.org/news/2015-09-tackles-conflicting-goals-coral-triangle.html>

CTI-CFF. (2009). *Coral Triangle Initiative* . Retrieved from Coral Triangle Initiative : <http://www.coraltriangleinitiative.org/about> diakses pada tanggal 10 September 2017

- Danaparamitha, H. A. (2014, Oktober 19). *Unair*. Retrieved from Unair Website: http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_NegosiasidanDiplomasi-DiplomasiMultiTrek.html diakses pada tanggal 20 Oktober 2017
- Hijauku. (2015, Agustus 6). *Hijauku*. Diambil kembali dari Hijauku : <http://www.hijauku.com/2015/08/04/6-negara-adopsi-perikanan-berbasis-ekosistem/>
- indonesia, K. L. (2010). *Kementerian Luar Negeri Indonesia*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/CTI.aspx>
- Indonesia, N. (2014, 12 12). *CTI Indonesia*. Diambil kembali dari CTI Indonesia: <http://nccctiindonesia.kkp.go.id/?p=139>
- Initiative, C. T. (2017, April 2). *The Coral triangle Initiative on Coral reefs, Fishieries, and Food Security (CTI-CFF)*: <http://www.coraltriangleinitiative.org> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017
- Manado, H. P. (2015, Oktober 28). *baghumaspromanado.tribunnews.com*. Retrieved from baghumaspromanado.tribunnews.com: <http://baghumaspromanado.tribunnews.com/2015/10/28/gedung-cti-manado-tempat-pertemuan-penyelamatan-terumbu-karang-dunia>
- McDonald, J. W. (2003, September). *Beyond Intractability*: <http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy> diakses pada tanggal 29 September 2017
- Muhajir, A. (2015, September 2). *Mongabay* . Retrieved from Mongabay : <http://www.mongabay.co.id/2015/09/02/forum-bisnis-regional-cti-menentukan-aturan-wisata-bahari/>
- National Geographic Indonesia* . (2013, Desember 12). Retrieved from National Geographic Indonesia : <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/12/kabar-baik-dari-timor-leste>
- Nesha, J. H. (2016). *Underwater 360*. Diambil kembali dari Underwater 360: <http://www.uw360.asia/how-reef-check-malaysia-are-protecting-coral-reefs/>
- Pravita, D. (2013, February 14). *NRM News.com*. Diambil kembali dari NRM News.com: <https://nrmnews.com/2013/02/14/gedung-sekretariat-coral-triangle-initiative-bukti-komitmen-ri-menjalankan-program-kawasan-segitiga-karang/>
- Rare.org. (2010). *Rare* . Diambil kembali dari Rare: <https://www.rare.org/id/philippines>
- Roza, E. (2017, September 1). *Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia*: <http://kkp.go.id/2017/09/01/maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

- Security, C. T. (2009). *Coral Triangle Initiatives on Coral Reefs Fisheries and Food Security*. Retrieved from Coral Triangle Initiatives on Coral Reefs Fisheries and Food Security: <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/papua-new-guinea>
- Security, T. C. (2009). *Climate Change Adaptation (CCA)*. Diambil kembali dari Coral Triangle Initiatives on Coral Reefs Fisheries and Food Security: <http://www.coraltriangleinitiative.org/cca>
- Sigit, R. R. (2013, Oktober 10). *Mongabay*. Diambil kembali dari Mongabay : <http://www.mongabay.co.id/2013/07/10/tahun-2020-pemerintah-targetkan-20-juta-hektar-kawasan-konservasi-perairan-dan-laut/>
- Tomahawk. (2018). *Tourism websites of Solomon*. Retrieved from Tourism websites of Solomon: <http://www.visitsolomons.com.sb/about-solomons/under-the-water>
- Wihardandi, A. (2014, March 14). *Mongabay*. Diambil kembali dari Mongabay: <http://www.mongabay.co.id/2014/03/14/penelitian-kabut-asap-berdampak-serius-bagi-ekosistem-laut/>